KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Angka lantas masih tinggi, mesti diingat, mudik motor berbahaya tuh
Tanggal : Senin, 23 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Angka Lantas Masih Tinggi

Mesti Diingat, Mudik Motor Berbahaya Tuh

WAKIL Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak pembatasan penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh selama lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan dengan fatalitas tinggi yang memicu banyak korban jiwa.

Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir tingkat kemacetan selama arus mudik dan balik lebaran terus menurun. Tidak ada lagi kemacetan horor yang membuat pemudik berhari-hari di jalanan.

Karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri harus mengalihkan perhatian pada strategi menekan angka kecelakaan dengan fatalitas tinggi yang memicu banyak korban jiwa. "Yaitu penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi jarak jauh," ujarnya.

Huda menilai, berkurangnya titik kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran merupakan buah dari kian lengkapnya jaringan infrastruktur nasional. Seperti tersambungnya Tol Trans Jawa, semakin panjangnya bentangan Tol Sumatera, dan integrasi teknologi informasi dalam manajemen arus kendaraan.

Huda juga melihat kemajuan nyata dalam mengurai kepadatan selama arus mudik dan balik lebaran. Strategi manajemen lalu lintas seperti kebijakan ganjil- genap, contraflow, hingga one way di jalur tol sangat membantu menurunkan potensi kemacetan. "Solidnya koordinasi lintas sektoral membuat arus mudik jauh lebih lancar dalam beberapa tahun terakhir," kata politikus PKB ini.

Meski kemacetan berhasil diredam, Huda mengingatkan angka kecelakaan lalu lintas masih menjadi rapor merah yang perlu segera dibenahi. Saat ini, angka kecelakaan masih berada di kisaran 1.000 kejadian dengan ratusan korban jiwa dalam setiap periode mudik. Mayoritas insiden tersebut terjadi di jalur arteri (non-tol) dan didominasi oleh pengguna sepeda motor. "Lancar saja tidak cukup jika nyawa pemudik masih terancam," kata dia mengingatkan.

Huda mengungkap fakta jalur arteri dan kendaraan roda dua mendominasi angka kecelakaan fatal selama arus mudik dan balik lebaran. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk intervensi kebijakan yang lebih berani.

Sebagai solusi, Huda meminta Pemerintah menyusun strategi push and pull atau dorong dan tarik yang komprehensif terkait penggunaan sepeda motor sebagai transportasi mudik jarak jauh. "Pemerintah tidak boleh sekadar melarang tanpa memberikan alternatif nyata," tandasnya.

Pemerintah, saran dia, bisa meningkatkan razia penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh sekaligus memberikan solusi transportasi publik yang masif, terjangkau, dan aman bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. "Pembatasan mudik motor perlu dilakukan karena memang berbahaya," jelasnya.

Dia menegaskan pembatasan mudik motor ini murni alasan kemanusiaan. Pihaknya ingin menekan angka kecelakaan fatal yang sering kali mengorbankan kelompok rentan seperti ibu dan anak-anak yang terpaksa menempuh perjalanan jauh dengan roda dua.

Sementara, anggota Komisi V DPR Sofwan Dedy Ardyanto meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan larangan sepeda motor untuk mudik lintas provinsi. Sebab tidak bisa membuat kebijakan tanpa sosialisasi jauh-jauh hari. Apalagi saat ini suasana kebatinan rakyat tentang kondisi ekonomi masih sedang tidak baik-baik saja. ■ PYB